

**ANALISIS KELEMBAGAAN PASCA DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

Prayogi Ayudia Putra

(20110520006)

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2015

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Dengan Judul :
“ANALISIS KELEMBAGAAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :
PRAYOGI AYUDIA PUTRA
20110520006

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :
Hari/Tanggal : Rabu / 22 April 2015
Tempat : Ruang Ujian IP
Jam : 08.00 WIB

SUSUNAN TIM PENGUJI

KETUA

Drs. Muchamad Zaenuri, M.Si

PENGUJI I

PENGUJI II

Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si

Dr. Inu Kencana Syafiie, M.Si.

Mengetahui

KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Dr. Suranto, M.Pol

HALAMAN MOTTO

*“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga”*

(H. R Muslim)

“orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena merasa lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”

(Ernest Newman)

*“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”*

(Confusius)

“Learn from the past, live for today, plan for tomorrow”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada,

- Allah SWT yang telah memberikan berkah serta nikmat yang luar biasa kepada saya hingga selesainya skripsi ini.
- Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Zainal R. Amir dan Ibu Nurliati yang selalu mencurahkan kasih sayang tak terhingga dan selalu sabar menanti keberhasilanku.
- Abang dan kakaku, Permana Putra & Nanda Larasanti yang selalu memotivasi dan memberikan semangat.
- Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
- Teman-teman seperantauan, teman-teman IPMKRKKJ dan Karimun FC, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
- Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2011 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Almamater yang selalu saya banggakan.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya dan juga tidak terdapat karya dan pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila dikemudian hari terbukti terdapat publikasi dan pihak lain yang merasa dirugikan, maka saya akan bertanggung jawab serta menerima konsekuensi yang menyertainya.

Yogyakarta, 08 April 2015

Penulis

Prayogi Ayudia Putra

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, kekuatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ada pun judul skripsi ini adalah “ANALISIS KELEMBAGAAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. Sholawat serta salam tidak lupa pula selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Ali Muhammad, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Suranto, M.pol selaku Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Zaenuri, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, arahan, waktu serta perhatian selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si selaku penguji I ujian skripsi.
6. Bapak Dr. Inu Kencana Syafiie, M.Si selaku II ujian skripsi.
7. Ibu Werdri Wiliandani selaku Kepala Bagian Kelembagaan Setda DIY yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran pengajar, dosen, staf TU dan staf akedemisi Fakultas ISIPOL dan jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga bantuan bapak/ibu berupa moril maupun materiil dalam rangka penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan baru bagi semua pihak. Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 April 2015

Prayogi Ayudia Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
SINOPSIS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Dasar Teori	11
1. Teori Organisasi	11
2. Restrukturisasi Organisasi	25
3. Kelembagaan	29
4. Regulasi Penataan Kelembagaan	32
F. Definisi Konseptual	35
G. Definisi Operasional	35
H. Metode Penelitian	37

1. Jenis Penelitian	37
2. Jenis Data dan Sumber Data	37
3. Obyek dan Subyek Penelitian	38
4. Teknik Pengumpulan Data	38
5. Teknik Analisis Data	39
BAB II Deskripsi Obyek Penelitian	41
A. Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	41
1. Periode I : 1945-1946	42
2. Periode II : 1946-1950	46
3. Periode III : 1950-1965	49
4. Periode IV : 1965-1998	55
5. Periode V : 1998-2008	57
6. Periode VI (Peralihan) : 2007-2012	60
B. Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta	65
C. Visi dan Misi	67
D. Penyelenggaraan Pemerintahan	70
E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DIY	74
BAB III PEMBAHASAN	75
A. Proses Penataan Kelembagaan	75
1. Pembentukan Regulasi	79
2. Gambaran Kondisi Kelembagaan terkini	83
3. Analisis Kebutuhan Kelembagaan	85
4. Penyusunan Struktur	87

B. Analisis Struktur Kelembagaan DIY	89
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penataan Kelembagaan	98
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1	13
Gambar 1.2	16
Gambar 2.1	65
Tabel 3.1	78
Tabel 3.2	91

SINOPSIS

Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan pengakuan Keistimewaannya dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Bidang kelembagaan menjadi salah satu topik kewenangan keistimewaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam perdais.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menggambarkan kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca diberlakukannya UU keistimewaan. Objek penelitian pelaksanaan UU keistimewaan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian pasca diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, terdapat perubahan dibidang kelembagaan pemerintah DIY. Dengan perubahan tersebut pemerintah DIY melakukan penataan kelembagaan. Proses penataan kelembagaan dilihat dari 1) pembentukan regulasi; 2) gambaran kondisi kelembagaan terkini 3) analisis kebutuhan lembaga 4) penyusunan struktur. Setelah dilakukan analisis struktur kelembagaan pemerintah DIY diketahui bahwa desain atau model organisasi perangkat daerah yang sesuai adalah Birokrasi Mesin. Sedangkan faktor penyebab perubahan atau penataan kelembagaan Pemerintah DIY adalah karena adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapatnya perubahan di beberapa SKPD DIY. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam melakukan penataan kelembagaan pemerintah DIY yaitu karena tidak adanya turunan PP atau Permendagri dari UU keistimewaan, sehingga dapat dikatakan UU keistimewaan terjun bebas langsung ke perdais.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, diharapkan Pemerintah Daerah DIY dapat bekerja optimal, efektif dan efisien dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena telah dilakukannya penataan kearah yang lebih baik. Pemerintah Pusat juga diharapkan untuk membuat Peraturan Pemerintah atau pun Peraturan Menteri yang mengatur tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kelembagaan untuk dijadikan sebagai pedoman penataan kelembagaan. Segera disahkannya Perdais Tentang Kelembagaan agar memudahkan Pemerintah DIY dalam melakukan penataan kelembagaan pasca diberlakukannya UU keistimewaan.